

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Daerah didalam Mengeluarkan izin berusaha bidang lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 2) Untuk mengetahui Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah setelah keluarnya izin berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara inventarisasi terhadap seluruh bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti, sistematisasi membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, interpretasi terhadap semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan izin berusaha bidang Lingkungan Hidup terjadi Pergeseran Asas Desentralisasi ke Asas Sentralisasi: Kewenangan Pemerintah Daerah yang kemudian dicabut atau dikembalikan ke UU Cipta Kerja. Menurut Pasal 1 angka (5) UU Pemda, Sedangkan, dalam Pasal 1 angka (8) UU Pemerintah Daerah Desentralisasi; 2) Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah setelah adanya izin berusaha antara lain: Penilai Amdal, Tim Penilai, Yang terlibat dalam Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Syarat Izin Lingkungan, Izin Lingkungan, Pengawasan (adanya Perubahan dari UU 32 2009 dalam UU 6 2023). Sanksi terhadap pejabat pengawas Lingkungan hidup maka kemudian dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil negara. Didalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur didalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur Sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara.

Kata kunci: Negara Hukum Kesejahteraan, Kewenangan dan Perizinan.

REGIONAL AUTHORITY IN ENVIRONMENTAL BUSINESS

LICENSING IN LAW NUMBER 6 OF 2023

ABSTACT

This research aims: 1) To find out the authority of the Regional Government in issuing business permits in the environmental sector Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. 2) To find out the Regional Government's Supervisory Authority after the issuance of a business permit based on Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. The research method used is a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of the legal materials used in this research was carried out by taking an inventory of all legal materials relating to the laws and regulations under study, systematically classifying the written legal materials, interpreting all laws and regulations in accordance with the problems being discussed. The results of the research show that 1) The authority of the Regional Government in issuing business permits in the Environmental sector has shifted from the Decentralization Principle to the Centralization Principle: The Regional Government's authority has then been revoked or returned to the Job Creation Law. According to Article 1 number (5) of the Regional Government Law, meanwhile, in Article 1 number (8) of the Decentralized Regional Government Law; 2) The Regional Government's supervisory authority after obtaining a business permit includes: Amdal Assessor, Assessment Team, which is involved in preparing Environmental Impact Analysis, Environmental Permit Requirements, Environmental Permits, Supervision (amendments from Law 32 2009 in Law 6 2023). Sanctions against environmental supervisory officials can then be given sanctions in accordance with the laws and regulations governing the State Civil Service. In the State Civil Apparatus Law as regulated in Law no. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus regulates sanctions against State Civil Apparatus.

Keywords: Welfare Law, Authority and Licensing.